



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE
PADANG PROVINSI SUMATRA BARAT
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 9-11 FEBRUARI 2022**



Sekretariat Komisi VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id

DAFTAR ISI

JADWAL ACARA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. UMUM
- B. DASAR KUNJUNGAN KERJA
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. OBYEK KUNJUNGAN KERJA

BAB II KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE PADANG

- A. PERTEMUAN DI KANTOR WALIKOTA PADANG
- B. PENINJAUAN KE MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PADANG

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

BAB IV PENUTUP

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAK SI	DAPIL
NO	AN G				
1.	003	MARWAN DASOPANG	WAKIL KETUA KOMISI VIII/ KETUA TIM	PKB	SUMUT II
2.	172	SELLY ANDRIANY GANTINA, A. MD	ANGGOTA	PDIP	JABAR VIII
3.	225	MATINDAS J. RUMAMBI, S.SOS	ANGGOTA	PDIP	SULTENG
4.	298	HJ. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.SOS.,M.M	ANGGOTA	PG	JABAR IX
5.	280	MOHAMMAD SALEH, SE.	ANGGOTA	PG	BENGGULU
6.	062	M. HUSNI, S.E., M.M	ANGGOTA	GER	SUMUT I
7.	098	H. ABDUL WACHID	ANGGOTA	GER	JATENG II
8.	014	H. MAMAN IMANUL HAQ	ANGGOTA	PKB	JABAR IX
9.	529	DR. H. ACHMAD, M.SI	ANGGOTA	PD	RIAU
10.	434	HJ. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A	ANGGOTA	PKS	JABAR VI
11.	483	H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H	ANGGOTA	PAN	SUMBAR I
12.	-	AGUS WIDIJATMOKO S.H	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
13.	-	MARDIYANA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
14.	-	INAH ROFIKHOH	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
15.	-	KUNTO CATUR PANGESTU, S.H., M.H	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
16.	-	MOHAMMAD HASYIM, S.S., M.SI	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
17.	-	MUHAMMAD HUSEN	MEDIA CETAK DAN SOSIAL DPR		

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapsiagaan bencana yang merupakan ruang lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Fungsi pengawasan ini dilakukan dengan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat.

t

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR RI memiliki hak di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Pasal 98 Ayat (4) huruf f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Untuk melakukan komunikasi dan menyerap aspirasi berkaitan dengan program perlindungan anak dan pendidikan keagamaan di Kota Padang, Sumatera Barat.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan pendidikan keagamaan di Kota Padang, Sumatera Barat.

2. Tujuan

- a. Secara umum untuk mendapatkan data faktual mengenai perlindungan anak dan pendidikan keagamaan di Kota Padang, Sumatra Barat.
- b. Secara khusus untuk mendapatkan data faktual mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang serta Kantor Kemenag Kota Padang, Sumatera Barat.

D. LOKASI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Objek kunjungan kerja spesifik ini adalah pertemuan di Kantor Walikota Padang dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang Sumatra Barat.

BAB II

KUNJUNGAN KERJA KE KOTA PADANG

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI tiba di Bandara Internasional Minangkabau Pukul 08.20 WIB, Lalu menuju Kantor Walikota Padang. Pukul 09.00 WIB Tim Kunjungan Kerja Spesifik tiba di kantor walikota padang didampingi oleh Pejabat Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Pertemuan di Kantor Walikota Padang

Dalam pertemuan di Kantor Walikota Padang, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI melakukan dialog dengan Walikota Padang Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B dan jajarannya dengan catatan sebagai berikut:

1. Walikota Padang melakukan pemaparan mengenai profil kota padang yang terdiri dari isu strategis Kota Padang dengan poin sebagai berikut;
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah dalam melayani masyarakat;
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
 - c. Kreatifitas dan kenakalan remaja;
 - d. Pemberdayaan IKM, UKM dan UMKM serta Peningkatan Potensi;
 - e. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur;
 - f. Genangan jika hujan bertepatan dengan pasang naik air laut;
 - g. Masalah lingkungan dan pengelolaan persampahan;
 - h. Optimalisasi potensi pariwisata;
 - i. Ketertiban;
 - j. Daerah rawan bencana;
 - k. Perlindungan terhadap perempuan;
 - l. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan;
 - m. Pemulihan Ekonomi;
2. Walikota Padang juga menyampaikan potensi ancaman bencana yaitu Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta epidemic dan wabah penyakit;
3. Beberapa poin kebijakan yang dipimpin oleh Walikota Padang dalam pencegahan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yaitu Meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter sejak dini, dan meningkatkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan keluarga untuk pembentukan karakter anak sejak dini yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara program pukul 18.00 sd 21.00 wib pemerinah mewajibkan orang tua dan anak melakukan komunikasi intensif, subuh sajadah, didikan subuh, maghrib mengaji dan hafalan 1 juz al-quran untuk anak sekolah dasar juga memberikan reward dan penghargaan umroh bagi orang tua yang melaksanakan program tersebut

4. Dalam penanganan pandemic covid 19 Walikota Padang mendukung program vaksinasi dan memberikan kebijakan kepada peserta didik dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka diwajibkan melakukan vaksinasi namun apabila tidak berkenan dapat melakukan pembelajaran secara online.
5. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah cepat Walikota Padang dan jajarannya dalam pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak.
6. Aspirasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Sumatra Barat adalah permohonan permintaan penambahan personil pns pada lingkungan kerjanya.
7. Aspirasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah penambahan alat sarana dan prasarana berupa Gudang Logistik yang saat ini masih sewa dan mengusulkan memiliki tanah daerah untuk dapat di bangun Gudang stock bantuan serta kendaraan roda empat untuk penyaluran bantuan.

B. Peninjauan ke Madrasah Aliyah Negeri / MAN 2 Kota Padang

Tim kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI menuju ke lokasi peninjauan pengawasan Kementerian Agama yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) Kota Padang Sumatra Barat didampingi oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Sumatra Barat dengan catatan peninjauan sebagai berikut;

1. Sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang Drs. H. AKHRI MEINHARDI, MM dan menjelaskan profil sekolah;
2. Pembelajaran tatap muka telah berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan disetiap ruang kelas disediakan handsanitizer, pengajar dan peserta didik menggunakan masker;
3. Dalam peninjauan lapangan Anggota Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI disuguhkan dengan penampilan seni tari dari berbagai tarian adat Kota Padang Sumatra Barat dan Kegiatan Siswa/i lainnya;
4. Aspirasi Guru memohon bantuan buku pembelajaran pesantren fiqih akidah ahlak dan penambahan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh Kementerian

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam hal pengawasan mendapatkan penilaian bahwa pelaksanaan serta penanganan program khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Agama Republik Indonesia berjalan dengan baik dan didukung oleh pemerintahan daerah.

Permasalahan atas kekerasan seksual dan anak menjadi program utama pada pemerintah kota padang dengan menjalankan nilai – nilai agama dan sosial yang diterapkan di sekolah dan lingkungan keluarga.

Penanganan bencana pada Kota Padang diusulkan untuk mendukung pembangunan gudang stock logistic sebagai penyimpanan barang bantuan yang akan disalurkan pada kemudian hari yang saat ini masih dibebani pada fasilitas sewa yang kurang memadai.

B. Rekomendasi

Dari Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Padang Provinsi Sumatra Barat ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Perlunya dipertimbangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kota perihal kebutuhan gudang penyimpanan logistic atau kebutuhan penyaluran bantuan untuk dapat diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat melakukan perawatan seluruh alat yang dimiliki.
3. Meminta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan bantuan buku pelajaran kepada seluruh pondok pesantren Kota Padang Provinsi Sumatra Barat.

4. Mendukung kebutuhan untuk penerapan pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual sebagai perhatian oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintah Kota wilayah Kota Padang Provinsi Sumatra Barat.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI ke Kota Padang Provinis Sumatra Barat, pada masa persidangan III Tahun Sidang 2021 – 2022 ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di Komisi VII DPR RI.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

WAKIL KETUA

MARWAN DASOPANG